



Danai Partai

Politik Adu Sigap

PONTIANAK, SP – Partai politik masih kesulitan mendapatkan dana-dana segar bagi operasional dan kampanye partai. Tak heran bila beragam cara dilakukan demi mendapatkan dana operasional tersebut.

Ketua DPD Partai Hati Nu-

rani Rakyat (Hanura) Kalbar, Suyanto Tanjung mengakui bahwa, untuk melaksanakan kampanye pada saat pemilihan legislatif (Pileg), memerlukan biaya yang tidak sedikit bagi partai politik (Parpol).

Namun di Partai Hanura, kata dia, biaya itu semaksimal mungkin diminimalisir.

Caranya, dengan menyinergikan antara Parpol bersama mereka yang akan maju, baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi, maupun pusat.

“Membangun sinergitas antara calon. Kemudian para calon ini bersama-sama turun. Jadi, biaya yang mahal dulunya kita pangkas, menjadi biaya yang

• **Baca Halaman 7**



Suyanto Tanjung
Ketua DPD Partai Hanura Kalbar

Membangun sinergitas antara calon. Kemudian para calon ini bersama-sama turun. Jadi, biaya yang mahal dulunya kita pangkas, menjadi biaya yang murah.



Subhan Noviar
Ketua KAHMI Kalbar

Harus bisa diukur semuanya. Jangan sampai dana itu hanya digunakan untuk hal-hal seremonial yang tidak bisa diukur manfaatnya kepada masyarakat.



Hal 1 ■ adu sigap

murah,” ujarnya kepada *Suara Pemred*, Selasa (12/12).

Pada Pileg mendatang, ia memastikan kader Hanura yang akan maju menjadi legislatif, tidak perlu mengeluarkan biaya besar. Kalaupun misalkan calon dulunya harus keluar biaya hingga ratusan juta karena memang politik butuh biaya, di Hanura akan jauh biayanya di bawah itu.

“Turunnya drastis. Kalau dulu mungkin satu anggota dewan membutuhkan biaya Rp500 juta, nah sekarang mungkin sekitar Rp50 juta saja,” ucapnya.

Ia mengungkapkan, Partai Hanura dalam mengumpulkan biaya (*fundraising*) politik untuk kampanye, murni dari internal partai. “Tidak ada (dari pihak luar) lah,” katanya.

Berkenaan dengan wacana pemerintah bisa membiayai kampanye Parpol, menurut Suyanto, itu suatu langkah yang bagus. “Supaya tidak ada *cost* politik yang dikeluarkan oleh calon. Dengan demikian, berarti ketika dia terpilih, dia tahu bahwa dia betul-betul harus mengabdikan kepada negara ini. Mestinya begitu, dan kita *peingennya* seperti itu,” ujarnya.

Selain dari kader, PBB juga mendapatkan himpunan dana politik dari simpatisan partai. Sementara dari pihak luar? “Tidak ada. Siapa yang mau nyumbang,” kata dia.

Ia mengungkapkan, berdasarkan Pileg sebelumnya, maka dibutuhkan biaya yang lumayan besar. “Untuk kampanye, ya sekitaran Rp1-2 miliar gitu lah,” sebutnya.

Ia menilai baik, apabila wacana negara akan membiayai Parpol dalam melakukan aktivitas politik saat Pemilu. Namun, sebelum wacana itu wujudkan, yang menjadi pertimbangan adalah, bagaimana kondisi keuangan negara saat ini.

“Paling tidak kita melihat kebutuhan negara itu seperti apa. Kalau negara sangat membutuhkan anggaran yang besar untuk Pilpres atau Pileg, itu kan bisa nggak pas, sementara negara kita sedang morat-marit masalah dana,” katanya.

Saling Lempar

Terkait aturan dana kampanye partai politik, *Suara Pemred* mencoba mengonfirmasi hal tersebut pada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Barat, Umi Rifdiyawati. Namun, Umi menyarankan agar menanyakan persoalan itu ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kalbar. Dia mengatakan kewenangan ada pada lembaga tersebut.

“Konfirmasi ke Bawaslu saja ya. Karena dana kampanye Parpol jadi kewenangan Bawaslu,” ujarnya.

Sementara itu, Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga, Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat, Kristantus Heru Siswanto menerangkan, dana kampanye partai politik tersebut dilaporkan ke KPU.

“PKPU tentang dana kampanye jelas-jelas oleh KPU, kok dilemparkan ke Bawaslu,” ucapnya.

Meskipun demikian, Kristantus menjelaskan Bawaslu tetap mengawasi. Na-

mun, konten dana kampanye yang menilai adalah, kantor akuntan publik yang ditunjuk KPU.

“Kita lebih fokus pengawasan kegiatan kampanyenya. Yang jelas terhadap dana kampanye, Bawaslu RI sudah MoU dengan PPATK untuk mengawasi sumber dana kampanye dari luar,” jelasnya.

Dana Kampanye

Salah satu warga, Markus (45) mengatakan bahwa, dirinya tidak setuju jika kampanye didanai melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), karena baik kepala daerah maupun anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dipilih rakyat untuk menyampaikan aspirasi dan membangun masyarakat. Bukan malah pemerintah menggelontorkan dana kepada partai, agar para wakil rakyat dapat menggunakan dana rakyat untuk memilih mereka kembali.

“Menurut saya itu salah. Tapi ndak tahulah mengapa bisa ada ide seperti itu. Cuma menurut saya lebih baik, dana yang mau digelontorkan pemerintah untuk membiayai Parpol untuk para calon dewan itu, bagus untuk pembangunan jak,” ujarnya.

Dia menilai, jika dana yang digelontorkan kepada partai rawan dan sulit dipertanggungjawabkan. Sebab, selama mengikuti Pemilu di Indonesia, dia tidak pernah melihat bentuk laporan pertanggungjawaban partai.

“Misalnya, kalau pemilihan legislatif, kan dari partai itu memang ada bantuan juga dari pemerintah. Memang ndak terlalu banyak, tapi pertanggungjawabannya kan ndak ada,” ujarnya.

Harus Terukur

Ketua KAHMI Kalbar,



Subhan Noviar mengatakan bahwa, secara aturan, jika seandainya dibiayai melalui APBN, maka harus bisa diperiksa. Baik itu melalui BPK maupun BPKP, serta tidak hanya membuat laporan saja, namun juga harus dicek kebenaran penggunaannya.

Selain itu, penggunaan dana tersebut juga harus dapat diukur. Yang penggunaannya untuk meningkatkan partisipasi di politik, meningkatkan pengetahuan politik masyarakat, dan melakukan pengkaderan terhadap kepemimpinan, baik itu pada tingkat eksekutif maupun legislatif.

"Harus bisa diukur semuanya. Jangan sampai dana itu hanya digunakan untuk hal-hal seremonial yang tidak bisa diukur manfaatnya kepada masyarakat," tuturnya.

Subhan menilai bahwa, pembangunan menggunakan dana APBN tidak hanya terkungkung pada pembangunan fisik belaka. Namun, peruntukan dana bagi Parpol dalam hal kampanye, juga dapat meningkatkan pembangunan terhadap pengetahuan masyarakat di bidang politik.

Dengan biaya politik yang tinggi, tidak jarang setelah terpilih ada yang berpikir modalnya mesti kembali.

"Nah, ketika ingin balik modal, segala hal dihalalkan. Kalau ditanya saya (pribadi), lebih condong Pemilu itu dibiayai oleh pemerintah. Tapi sistemnya harus diperbaiki semua. Kalau masih korupsi, ya proses hukum, dinyatakan bersalah, gantung," tegasnya.

Sementara, Sekretaris DPW Partai Bulan Bintang (PBB) Kalbar, Imam Muttaqin mengatakan, biaya politik seperti kampanye, di PBB sebagian besar dibiayai oleh pengurus pusat.

"Urusan kampanye Pileg atau Pilpres, memang dana itu datang dari DPP, itu 75 persen. 25 persennya, sumbangan dari kita semua anggota yang ada DPRD-nya," ujarnya.

"Sebenarnya saya melihat, pembangunan dalam hal peningkatan partisipasi politik, pengetahuan masyarakat mengenai politik dan orang yang baru bergabung di partai politik untuk kemampuan-kemampuan dalam hal nantinya jika terpilih sebagai eksekutif maupun legislatif dengan baik, itu juga sebenarnya juga berdampak pada masyarakat," katanya.

Namun hal itu juga menurutnya harus kembali dapat diukur. Dengan ukuran yang berdasarkan aturan yang jelas. Selain itu penggunaan dana tersebut juga harus transparan. Seperti halnya dengan APBD pada pemerintahan.

Dia mengatakan, partai juga memiliki peran dalam pembangunan masyarakat. Untuk itu, dirinya tidak memandang besar atau kecilnya suatu partai politik. **(bls/rah/umr/lis)**